



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMRIS ADNAN**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **195493**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.923.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 165.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 936 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Bangunan Seluas 25.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 428.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/110 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.040.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOBIL, MITSUBISI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.066.355.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.242.300.474
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.271.755.474
III. HUTANG	Rp.	139.096.426
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.132.659.048

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.